

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO,  
JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH PASIEN TERHADAP  
PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**Skripsi Oleh :**

**MARTA SEPTIAN**

**01021281722104**

**Jurusan Ekonomi Pembangunan**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

### PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH PASIEN TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun oleh:

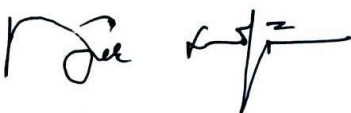
Nama : Marta Septian  
NIM : 01021281722104  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.


TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

24/2022  
01  
Tanggal : .....

  
Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP : 196007101987031003

25/2022  
01  
Tanggal : .....

  
Anggota : Dr. Siti Rohima, S.E, M.Si  
NIP : 196903142014092001

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH PASIEN TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun oleh:

Nama : Marta Septian  
NIM : 01021281722104  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

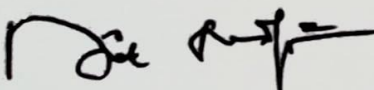
Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 25 Februari 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif  
Indralaya, Maret 2022


Ketua

Anggota

Penguji

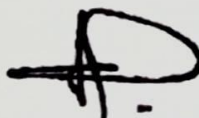
  
Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP. 196007101987031003

  
Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si  
NIP. 196903142014092001

  
Dr. Azwardi, S.E., M.Si  
NIP. 196805181993031003

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI  
JUR. EK. PEMBANGUNAN 24-3-2022  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

  
Dr. Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP. 197304062010121001

## **SURAT PERNYATAAN INTERGRITAS KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Marta Septian

NIM : 01021281722104

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:  
Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Jumlah Pasien  
terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota di provinsi  
Sumatera Selatan

Pembimbing:

Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si

Anggota : Dr. Siti Rohima, S.E.,M.Si

Tanggal Ujian : 25 Februari 2022

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, Maret 2022  
Pembuat Pernyataan,



Marta Septian  
NIM. 01021281722104

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini sebagaimana mestinya. Skripsi ini berjudul **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Jumlah Pasien Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk dan jumlah pasien terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu sumber PAD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu penerimaan retribusi pelayanan kesehatan harus dioptimalkan melalui program pemungutan yang intensif, efektif dan efisien.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

Indralaya, Februari 2022

Marta Septian  
NIM. 01021281722104

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, bapak Dr. Muklis, S.E, M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Pembangunan dan bapak Dr. Sukanto, S.E, M.Si selaku sekretaris jurusan Ekonomi Pembangunan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, S.E, M.Si dan Ibu Dr. Siti Rohima, S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas waktu, tenaga, wawasan, dan segala bentuk arahan yang telah diberikan kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
3. Bapak Dr. Azwardi S.E.,M.Si selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran-saran terbaik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E.,M.Si selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan saran-saran kepada penulis.
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya beserta staf pegawai dan karyawan/ti di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis selama ini.
6. Para staf dan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan instansi-instansi yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas izin dan informasi serta data yang diberikan kepada penulis yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

7. Kedua orang tua tersayang yang tak henti-hentinya memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis. Terima kasih cinta ketiga atas do'a dan dukungan mak dan abah dan semua yang telah kalian berikan kepada penulis hingga saat ini.
8. Buat saudara/saudariku, Yulius Pratama dan Ika Dahliana. Terima kasih kak dan yuk atas bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Tetap jaga ukhuwah ini dan sukses selalu buat kita semua.
9. Buat kawan-kawan jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2017, rekan-rekan BO Ukhuwah Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya periode 2018/2019, saudara-saudara UKM Beladiri PSHT Komisariat Universitas Sriwijaya dan sahabat-sahabat HIMA 4L Universitas Sriwijaya. Terima atas dukungan, motivasi dan amanahnya untuk mengurus organisasi ini selama beberapa tahun. Semoga organisasi tercinta tetap eksis kedepannya. Sahabat-sahabatku kang Riswan, kang Hendri, Kang Firman, Kang Aziz, Kang Tama, Aldhie Pur, Wais Al Qarni, Mbak Nilam, Mbak Tika, Mbak Ana, dan Mas Awan yang telah memberi ruang pada lingkaran kebaikan ini. Terima kasih atas waktu, motivasi dan dukungannya selama perkuliahan sampai sekarang. Ditunggu kisah sukses kalian semua.
10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Indralaya, Februari 2022

Marta Septian  
NIM. 01021281722104

## ABSTRAK

### PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH PASIEN TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

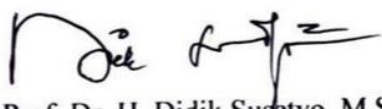
Oleh :

**Marta Septian; Didik Susetyo; Siti Rohima**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan jumlah pasien terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan dalam rentang tahun 2015-2020. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda data panel dengan metode pendekatan *fixed effect model* (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan kesehatan kabupaten/kota di Sumatera Selatan selama tahun pengamatan cenderung berfluktuatif, sedangkan variabel produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan jumlah pasien menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara simultan variabel produk domestik regional bruto, jumlah penduduk dan jumlah pasien berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, sedangkan secara parsial hanya variabel produk domestik regional bruto yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan.

**Kata Kunci:** *Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Jumlah Pasien*

Ketua,



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP. 196007101987031003

Anggota,



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si  
NIP. 196903142014092001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP. 197304062010121001



## ABSTRACT

### THE EFFECT OF GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT, NUMBER OF POPULATION AND NUMBER OF PATIENTS ON REGENCY/CITY HEALTH SERVICE RETRIBUTION INCOME IN SOUTH SUMATRA PROVINCE

By :

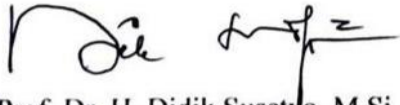
**Marta Septian; Didik Susetyo; Siti Rohima**

This study aims to analyze the effect of regional gross domestic product, population and number of patients on the regency/city health service retribution income in South Sumatra province. The data used in this study is panel data from 17 regencies/cities in South Sumatra from 2015 to 2020. The analytical technique used is the multiple linear regression analysis technique of panel data with a *fixed effect model* (FEM) approach. The results of this study indicate that regency/city health service retribution income in South Sumatra during the year of observation tends to fluctuate while the variables of gross regional domestic product, population and number of patients show an increase every year. The estimation results show that simultaneously the variables of gross regional domestic product, population and number of patients affect the income of health service while partially only the gross regional domestic product variables have a positive and significant effect on the income of health service.

**Keywords:** *Health Service Retribution Income, Gross Regional Domestic Product, Total Population, Number of Patients*

Head,

Member,



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP. 196007101987031003



Dr. Siti Rohima, S.E, M.Si  
NIP. 196903142014092001

Acknowledged,  
Head of Economics Development Department



Dr. Mukhlis, S.E.,M.Si  
NIP. 197304062010121001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Marta Septian
	Jenis Kelamin	Laki-Laki
	Tempat/Tanggal Lahir	Tanjung Raman, 1 September 1999
	Alamat	Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang
	Nomor HP	081367194652
Email	<a href="mailto:martaseptian1999@gmail.com">martaseptian1999@gmail.com</a>	
Nomor HP	081367194652	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Hobi	Olahraga Pencak Silat	
Tinggi Badan	166 cm	
Berat Badan	60 kg	
<b>PENDIDIKAN FORMAL</b>		
2005-2011	SD Negeri 9 Pendopo	
2011-2014	SMP Negeri 2 Pendopo	
2014-2017	SMA Negeri 1 Pendopo Barat	
2017-2021	S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya	
<b>PENGALAMAN ORGANISASI</b>		
2017-2018	Anggota HIMA 4L Unsri	
2018-2019	Kadept. DKM BO Ukhuwah FE Unsi	
2019-2020	Ketua Umum UKM Beladiri PSHT Komisariat Unsri	
2018-2021	Pelatih Pencak Silat PSHT Komisariat Unsri	

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN KOMPREHENSIF</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	15
1.3. Tujuan Penelitian .....	16
1.4. Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
2.1. Landasan Teori .....	18
2.1.1. Peranan Pemerintah dalam Perekonomian .....	18
2.1.2. Teori Penerimaan Negara .....	18
2.1.3. Pendapatan Asli Daerah .....	23
2.1.4. Retribusi Daerah .....	26
2.1.5. Retribusi Pelayanan Kesehatan .....	36
2.1.6. Produk Domestik Regional Bruto .....	39
2.1.7. Penduduk .....	40

2.2. Penelitian Terdahulu .....	41
2.3. Kerangka Pemikiran .....	47
2.4. Hipotesis Penelitian .....	48
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
3.1. Ruang Lingkup Penelitian .....	50
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	50
3.3. Teknik Analisis .....	51
3.3.1 Teknik Analisis Deskriptif Kuantitatif .....	51
3.3.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel .....	54
3.3.3 Pengujian Asumsi Klasik .....	56
3.3.4 Pengujian Koefisien Statistik .....	58
3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	59
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
4.1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan.....	61
4.1.1. Perkembangan PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Pasien Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan .....	63
4.1.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto .....	65
4.1.1.2. Perkembangan Jumlah Penduduk .....	70
4.1.1.3. Perkembangan Jumlah Pasien .....	74
4.2. Hasil Penelitian .....	80
4.2.1. Model Regresi Data Panel .....	80
4.2.2. Pemilihan Model Akhir .....	83
4.2.2.1. Uji Chow (Chow Test) .....	83
4.2.2.2. Uji Hausman (Hausman Test) .....	84
4.2.3. Pengujian Asumsi Klasik .....	85
4.2.3.1. Uji Normalitas .....	85
4.2.3.2. Uji Autokorelasi .....	86

4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas.....	86
4.2.3.4. Uji Multokolinearitas .....	87
4.2.4. Pengujian Koefisien Statistik .....	88
4.2.4.1. Pengujian Secara Keseluruhan (Uji F) .....	88
4.2.4.2. Pengujian Secara Parsial (Uji t) .....	89
4.2.4.3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	90
4.3. Pembahasan .....	91
4.3.1. Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Pasien Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan .....	91
4.3.2. Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan .....	92
4.3.3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan .....	94
4.3.4. Pengaruh Jumlah Pasien Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan .....	97
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
5.1. Kesimpulan .....	100
5.2. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2020 .....	10
Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Pasien Penderita Penyakit Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2020 .....	14
Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Perkotaan dan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 .....	62
Tabel 4.2 Nilai Rata-Rata PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Pasien Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2020.....	64
Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	66
Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2020 .....	71
Tabel 4.5 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 .....	77
Tabel 4.6 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 .....	78
Tabel 4.7 Hasil Estimasi dengan Common Effect Model (CEM) .....	80
Tabel 4.8 Hasil Estimasi dengan Fixed Effect Model (FEM) .....	81
Tabel 4.9 Hasil Estimasi dengan Random Effect Model (REM) .....	82
Tabel 4.10 Hasil Regresi Menggunakan Uji Chow .....	83
Tabel 4.11 Hasil Regresi Menggunakan Uji Hausman .....	84
Tabel 4.12 Hasil Regresi Menggunakan Uji Heteroskedastisitas .....	87
Tabel 4.13 Hasil Regresi Menggunakan Uji Multikolinearitas .....	87
Tabel 4.14 Nilai Intersep Individu (Kabupaten/Kota) .....	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan .....	7
Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan .....	12
Gambar 2.1 Skema Penerimaan Pemerintah Pusat .....	19
Gambar 2.2 Skema Penerimaan Pemerintah Daerah .....	24
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	48
Gambar 4.1 Distribusi PDRB ADHK 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.....	69
Gambar 4.2 Distribusi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.....	74
Gambar 4.3 Perkembangan Jumlah Pasien Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2020.....	75
Gambar 4.4 Persentase Tenaga Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.....	79
Gambar 4.5 Hasil Regresi Menggunakan Uji Normalitas .....	85
Gambar 4.6 Hasil Regresi Menggunakan Uji Autokorelasi .....	86

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Regresi Menggunakan Common Effect Model (CEM) .....	108
Lampiran 2 Hasil Regresi Menggunakan Fixed Effect Model (FEM) .....	109
Lampiran 3 Hasil Regresi Menggunakan Random Effect Model (REM) .....	110
Lampiran 4 Hasil Regresi Menggunakan Uji Chow (Redundant Test) .....	111
Lampiran 5 Hasil Regresi Menggunakan Uji Hausman (Hausman Test) .....	112
Lampiran 6 Hasil Regresi Menggunakan Uji Normalitas.....	113
Lampiran 7 Hasil Regresi Menggunakan Uji Heteroskedastisitas.....	113



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Keberhasilan pemerintah pusat dalam kemajuan pembangunan daerah terlihat dari tingkat kemandirian daerah dalam mengelola daerahnya. Kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah dengan memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata (Kuncoro, 2010).

Otonomi daerah berdasarkan ketentuan undang-undang dapat didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32/2004). Lebih lanjut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur jalannya pemerintahan, urusan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka sejak tahun 2001 otonomi daerah dilaksanakan di seluruh provinsi dan

kabupaten/kota di Indonesia. Menurut Rasyid (1998) mengemukakan bahwa hal yang diharapkan dari otonomi daerah adalah pemberian pelayanan publik yang lebih memuaskan, mengakomodasi partisipasi masyarakat, pengurangan beban pemerintah pusat, menumbuhkan kemandirian dan kedewasaan daerah, serta menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001 dimana kebijakan tersebut dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya (Khaira, 2018). Desentralisasi sendiri adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada Daerah Otonom untuk menjadi urusan rumah tangga Daerah Otonom. Bank Dunia menyebut bahwa program desentralisasi di Indonesia termasuk program besar dan disebut sebagai *big bang decentralization*. Kebijakan tersebut tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan daerah sepenuhnya menjadi wewenang daerahnya. Pengelolaan keuangan sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah pada kabupaten dan kota di Indonesia dimulai dengan penyerahan wewenang antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi meliputi berbagai hal, seperti halnya pembiayaan untuk pembangunan daerah. Hal ini lebih dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam upaya memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, peran pemerintah daerah sangat penting dalam menggali potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Di samping mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang telah dipungut selama ini. Kewenangan daerah untuk memungut Pendapatan Asli Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang ini mencerminkan keleluasaan daerah untuk menggali sumber-sumber pembiayaan dari daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah akan menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menciptakan kemandirian daerah dimana PAD akan menjadi sumber dana utama bagi daerahnya. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah untuk kemajuan pembangunan daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah seperti laba BUMN, hasil kekayaan alam, dan lain sebagainya.

Sumber penerimaan daerah yang terbesar adalah dari sektor pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah pungutan pemerintah daerah dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap orang/badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna pembiayaan rumah tangga daerahnya. Sedangkan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat dari adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang berdasarkan pelayanan maupun pembayaran yang langsung dapat dinikmati secara perorangan oleh masyarakat dan pelaksanaannya berdasarkan atas peraturan yang berlaku disebut retribusi daerah.

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintahan daerah saja sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menggunakan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah diwajibkan membayar pajak atau retribusi terutang. Oleh karena itu masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memahami kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah memegang peranan penting maka dalam proses pemungutannya diperlukan aturan sebagai dasar hukum agar adanya kepastian hukum bagi pemungut retribusi tersebut. Pada hakikatnya retribusi daerah lebih beraneka ragam dan bervariasi antara daerah

yang satu dengan daerah lainnya. Semakin maju suatu daerah akan semakin banyak fasilitas atau jasa yang perlu disediakan untuk pemenuhan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga semakin banyak pula jasa-jasa retribusi yang dapat dipungut oleh daerah.

Retribusi yang selanjutnya disebut retribusi daerah merupakan pungutan atas penyediaan jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah. Adapun jenis-jenis retribusi daerah berdasarkan peraturan tersebut adalah retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu (Yani, 2008).

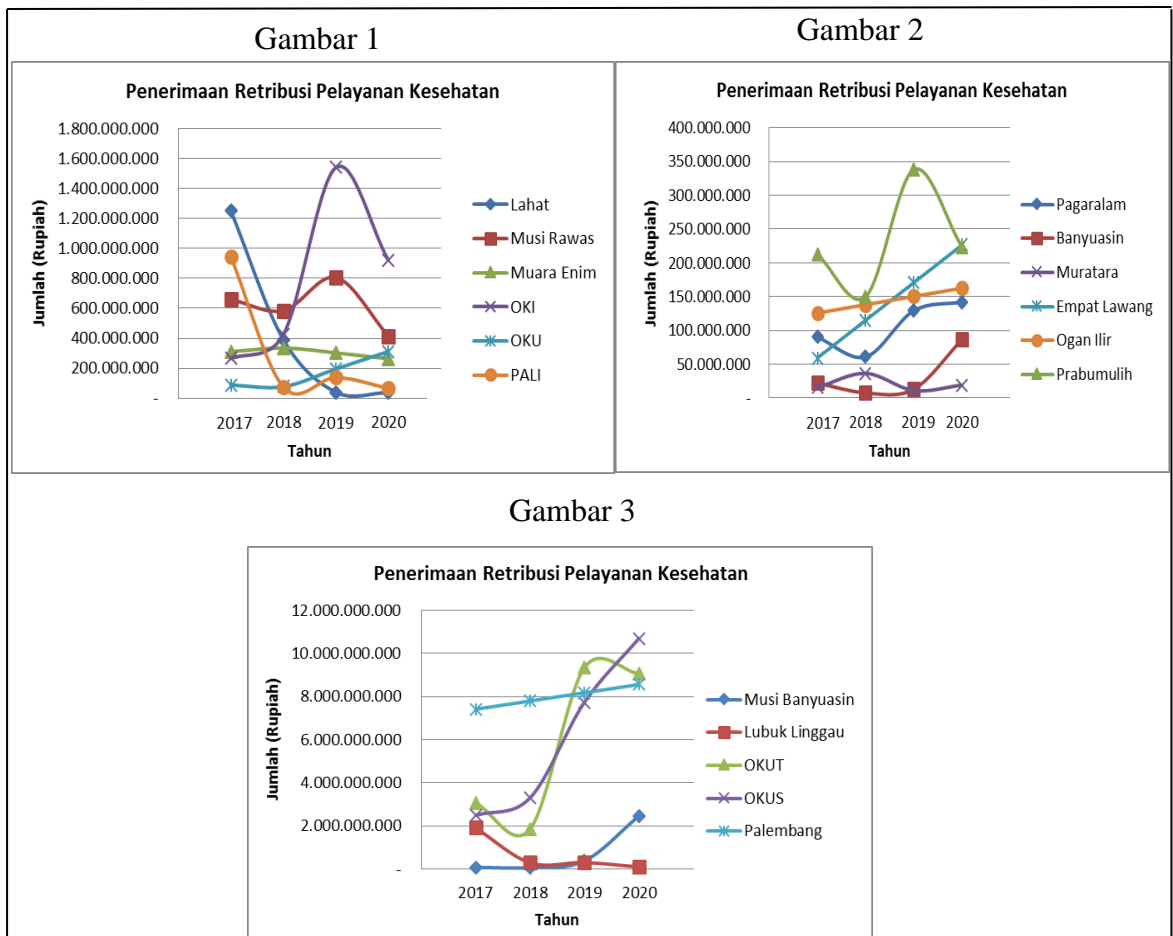
Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas jasa-jasa yang diberikan/disediakan oleh daerah dan digunakan untuk kepentingan umum. Adapun sasaran dari retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau Badan. Retribusi jasa umum pada Pasal 3 A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyatakan bahwa kriteria dari retribusi jasa umum adalah sebagai berikut; (1) yang termasuk dalam retribusi tersebut adalah jasa umum dan bersifat non pajak, (2) jasa tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat bersama, (3) jasa tersebut layak dikenakan retribusi, dan (4) dengan adanya pungutan atas jasa tersebut memungkinkan tersedianya pelayanan yang lebih baik.

Pasal 110-124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa jenis-jenis retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi

penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Salah satu objek retribusi jasa umum yang dikelola pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah retribusi pelayanan kesehatan. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2015 hingga 2020 cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada masing-masing kabupaten/kota. Adapun realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.



Sumber : DJPK, data diolah

**Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2020**

Berdasarkan Gambar 1.1. Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama empat tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3, dimana selama kurun waktu 2017 hingga 2018 penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di masing-masing kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan, seperti Kota Pagaralam, Prabumulih dan Lubuk

Linggau, serta Kabupaten Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, Banyuasin, OKU Timur dan Penukal Abab Lematang Ilir. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami peningkatan seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, OKU Selatan, OKU Timur, Ogan Ilir, Empat Lawang, PALI, dan beberapa kota seperti Kota Palembang, Prabumulih dan Pagaralam. Adapun beberapa daerah yang mengalami peningkatan sepanjang tahun 2017-2020, seperti Kota Palembang, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Empat Lawang. Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan terendah adalah Kota Pagaralam dengan penerimaan sebesar Rp 3,431,000, dan yang tertinggi adalah Kabupaten OKU Selatan dengan penerimaan sebesar Rp 10.703.663.959. Sampai pada tahun 2020 penerimaan retribusi pelayanan kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih menunjukkan fluktuasi, dimana penerimaan tersebut pada sebagian kabupaten/kota menunjukkan penurunan dan sebagian lainnya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada peluang dalam mengoptimalkan pendapatan retribusi daerah khususnya retribusi pelayanan kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun berikutnya.

Retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain, Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, dan jumlah pasien (Yulianto, 2005).



Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah merupakan indikator penting dalam menentukan arah pembangunan yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB.

Menurut Sukirno (2004), Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu pencerminan kemajuan suatu daerah. Meningkatnya PDRB menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan daerah, sebaliknya PDRB yang rendah mengindikasikan bahwa daerah tersebut belum mampu dikelola secara optimal.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan mendefinisikan PDRB sebagai jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada faktor-faktor produksi yang dimiliki daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB antar daerah bervariasi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Dengan meningkatnya PDRB akan menambah basis fiskal sebagai sumber penerimaan daerah untuk pembiayaan program-program pembangunan (Susetyo, 2008).

Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan memberikan gambaran kinerja perekonomian daerah. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ke tahun. Berikut ini akan disajikan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2020.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2020**

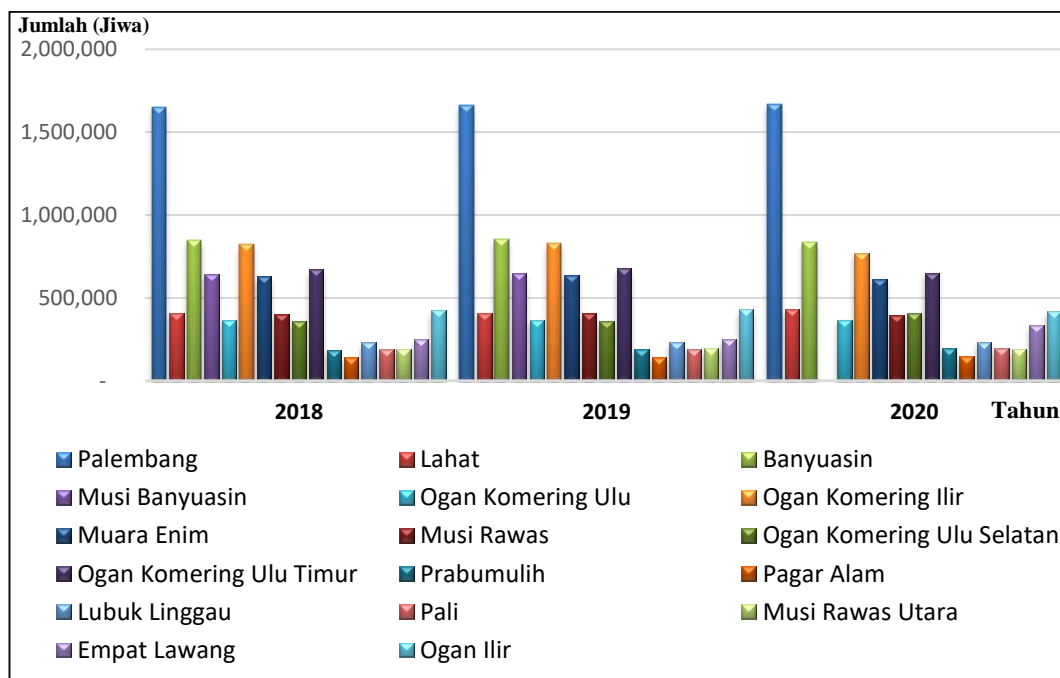
Kabupaten/Kota	PDRB ADHK (dalam Miliar Rupiah)		
	2018	2019	2020
Palembang	98,661	104,526	104,043
Lahat	11,724	12,382	12,472
Musi Banyuasin	42,678	44,627	44,605
Musi Rawas	12,922	13,682	13,714
Muara Enim	38,864	41,594	41,595
Ogan Komering Ilir	19,219	20,207	20,228
Ogan Komering Ulu	9,349	9,876	9,867
Prabumulih	5,102	5,385	5,375
Pagar Alam	2,161	2,230	2,234
Lubuk Linggau	4,109	4,343	4,334
Banyuasin	18,989	19,981	20,000
OKU Timur	9,506	10,063	10,054
OKU Selatan	5,442	5,718	5,732
PALI	4,433	4,706	4,717
Empat Lawang	3,349	3,470	3,473
Musi Rawas Utara	5,332	5,116	5,573
Ogan Ilir	7,119	7,486	7,493
<b>Jumlah</b>	<b>291,840</b>	<b>307,907</b>	<b>315,465</b>

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, data diolah*

Berdasarkan Tabel 1.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 2015 hingga 2019 cenderung mengalami peningkatan. Pertumbuhan PDRB tahun 2020 relatif kecil bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan, seperti Kota Palembang menjadi sebesar 104,043 triliun, Kota Prabumulih sebesar 5,375 triliun, Kota Lubuk Linggau sebesar 4,334 triliun, Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 44,605 triliun, Kabupaten OKU Timur sebesar 10,054 triliun dan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 9,867 triliun. Pertumbuhan PDRB yang relatif kecil ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia termasuk kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Kabupaten/Kota dengan PDRB tertinggi adalah Kota Palembang pada tahun 2018 sebesar Rp 96,66 triliun. Selanjutnya di tahun 2019 sebesar Rp 104,526 triliun dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 104,043 triliun. Adapun kabupaten/kota dengan PDRB terendah adalah Kota Pagaralam dimana pada tahun 2020 PDRB hanya sebesar Rp 1,893 triliun. Hingga tahun 2020 PDRB Kota Pagaralam mengalami peningkatan menjadi Rp 2,231 triliun. Meningkatnya pertumbuhan PDRB kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan memberikan gambaran bahwa masing-masing wilayah tersebut sedang dalam masa berkembang. Salah satu faktor penting untuk mengukur kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu adalah dengan melihat tingkat PDRB daerah tersebut.

Menurut Fitriah, Agus dan Saguyo (2018) selain PDRB, variabel penting dalam mempengaruhi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan adalah jumlah penduduk. Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada

perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Pertambahan jumlah penduduk memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan bahwa jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk tentunya harus disertai dengan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Adapun perkembangan jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut.



Sumber : BPS, Jumlah Penduduk

**Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2020**

Berdasarkan Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2018 hingga 2020

cenderung mengalami peningkatan. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Palembang dimana pada tahun 2018 jumlah penduduk sebesar 1,651,857 jiwa. Hingga pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan masing-masing 1,662,893 jiwa dan 1,668,848 jiwa. Jumlah penduduk paling sedikit adalah Kota Pagaralam dimana pada tahun 2018 sebesar 137,964 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah penduduk sebesar 139,194 ribu jiwa, hingga pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Pagaralam kembali mengalami peningkatan menjadi 143,844 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan dipastikan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Keadaan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik tentunya akan meningkatkan kepuasan pasien yang berkunjung ke lembaga kesehatan tersebut. Pasien merupakan setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di lembaga kesehatan yang disediakan daerah setempat. Berikut perkembangan total jumlah pasien yang menderita penyakit HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2020.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Jumlah Pasien Penderita Penyakit Kabupaten/Kota di**  
**Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2020.**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pasien Penderita Penyakit (jiwa)		
		2018	2019	2020
1	Ogan Komering Ulu	7.584	7.210	6.195
2	Ogan Komering Ilir	14.678	12.868	7.895
3	Muara Enim	16.910	18.234	16.530
4	Lahat	6.492	5.950	3.560
5	Musi Rawas	7.549	11.259	5.968
6	Musi Banyuasin	13.274	16.173	12.259
7	Banyuasin	24.472	27.633	11.355
8	Ogan Komering Ulu Selatan	7.252	5.939	3.570
9	Ogan Komering Ulu Timur	9.913	9.809	5.165
10	Ogan Ilir	7.852	6.570	5.360
11	Empat Lawang	2.231	2.548	2.268
12	Pali	5.558	6.526	3.425
13	Musi Rawas Utara	5.228	2.800	1.966
14	Palembang	53.264	57.872	30.306
15	Prabumulih	4.567	5.688	2.205
16	Pagar Alam	1.923	2.237	1.483
17	Lubuk Linggau	5.589	6.277	4.059
<b>Jumlah</b>		<b>194.336</b>	<b>205.593</b>	<b>123.569</b>

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan*

Berdasarkan Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Pasien Penderita Penyakit Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan fluktuasi. Penyumbang pasien penderita kasus penyakit terbanyak selama tahun 2018 sampai 2020 adalah Kota Palembang, dimana pada tahun 2019 pasien penderita penyakit seperti TB, Diare, serta Malaria sebanyak 57,872 orang. Jumlah pasien penderita kasus penyakit paling sedikit adalah Kota Pagaralam, dimana pada tahun 2020 kasus penderita penyakit sebanyak 1,483 orang. Selanjutnya pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah pasien di masing-masing kabupaten/kota. Peningkatan jumlah pasien ini mengindikasikan bahwa tingkat kesehatan

masyarakat mengalami penurunan. Namun, dengan bertambahnya jumlah pasien juga memiliki dampak positif terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan. Dimana penerimaan tersebut dapat dialokasikan untuk perbaikan fasilitas kesehatan sehingga akses masyarakat terhadap kesehatan semakin membaik. Pada keadaan tertentu dengan akses kesehatan yang layak turut mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Salah satu pelayanan yang mendasar bagi pemerintah daerah adalah pelayanan di bidang kesehatan. Dimana dalam penyediaan pelayanan kesehatan untuk masyarakat harus didukung dengan pembiayaan yang baik. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah penerimaan retribusi pelayanan kesehatan. Peningkatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Pasien. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti **“Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Pasien terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Pasien terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Pasien terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1) Bagi Akademisi

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau kontribusi bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan khususnya dan mahasiswa Fakultas Ekonomi pada umumnya tentang faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Kabupaten-Kota di Provinsi Sumatera Selatan mengingat retribusi pelayanan kesehatan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
- b) Sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

#### 2) Bagi Praktisi

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai rujukan dalam membuat kebijakan untuk kemajuan ekonomi daerah.



b) Pemerintah Kabupaten dan Kota serta Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah khususnya retribusi pelayanan kesehatan mengingat potensinya cukup besar dalam peningkatan pendapatan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Ajija, Shocrul R. 2012. *Cara Cerdas Menguasai E-views*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Asngari, Imam. 2008. *Modul Praktikum Ekonometrika Program Eviews dn Spss*. Laboratorium Computer Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Bandiyono, A. 2018. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan Ipm Dan Pengentasan Kemiskinan ( Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Info Artha*, 2(1), hal 11–28.
- Chitah, M. Ratih, A. E. & A. (2016). Pengaruh Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Trayek terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2013-2016. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang*. hal 1
- Dapin, R.H, Hartoyo, S. & Harianto. (2017). Peningkatan Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah ( RSUD-HD ) Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. Vol.9 No. 1, Juni 2017, hal 44
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. In Jakarta: Erlangga.
- Fitriah, Agus & Saguyo, A. P. 2018. Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Retrubusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Berau. *Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*, 2, 19–30.
- Gujarati, D. & D. C. P. 2011. *Dasar-Dasar Ekonometrika* (5th ed.). Salemba Empat.

- Hakib, Andi, dkk. 2020. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah MAMINASATA. *Center of Economic Student Journal*. Vol. 3, No. 3 2020. hal 290-300
- Hamsiah, A. (2019). Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah. In Amir (Ed.), *Bogor: Azkiya Publishing*. Azkiya Publishing.
- Jasasila. (2017). Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari 2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 1–6.
- Kalsum, Nyimas Umi. 2008. Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Kunjungan Pasien dan Tarif Retribusi terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Palembang Periode 1999-2006. *Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi. Universitas Sriwijaya, Indralaya*.
- Khaira, A. N. 2018. Pengaruh Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Sumatera Barat*.
- Kuncoro. 2010. *Ekonomi Pembangunan Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Lestari, Siska, dkk. 2016. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16, No. 02 2016. hal 306
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan* (Maya (ed.); Edisi terbaru). Yogyakarta : Andi
- Muslim, Caesar, dkk. 2019. Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Tingkat Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 2, No. 3 Juli 2019. hal 63
- Online Pajak. 2018. *Sumber Pendapatan Negara*. Diambil dari

<https://www.online-pajak.com/sumber-pendapatan-negara>.

Purwaningsih, L. P. 2018. Pengaruh Jumlah Pasien BPJS Kesehatan Terhadap Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau. *Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*, 2(2), 42.

Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".

Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah".

Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".

Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah," Pub. L. No. 33.

Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang".

Ryas, R. 1998. *Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*. LP3ES.Jakarta.

Sulfiana, Arum. Syafi'i. & Susanti, W. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Pengeluaran Pemerintah

Daerah terhadap PAD Kota Mojokerto. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol. 3. Issue. 3 2017, hal 830

Suparmoko. 2012. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Andi

Susetyo, D. 2008. Kinerja APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 05(3), hal: 197–204.

Umbas, Brigita R, dkk. 2018. Analisis Pengelolaan dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 796–803.

Yani, A. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.